



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pulau Belitung No 3 Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kec. Bukit Intan - Telp. (0717) 439313 / Fax. (0717) 434693 Pangkalpinang 33418

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4/26/KEP/INPTD/2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER**

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- b. bahwa pengawasan atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/28.a/DP3ACSKB/2022 tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pembentukan Forum Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2022 - 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
- Kedua : Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender diberlakukan untuk audit reguler dan audit dengan tujuan tertentu.
- Ketiga : Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dengan ruang lingkup sebagaimana pada lampiran 1, Format GBS (Gender Budget Statement) dengan analisis menggunakan GAP (Gender Analysis Pathway) sebagaimana dalam lampiran 2, Format GBS dengan Analisis Menggunakan Instrumen Selain GAP sebagaimana dalam lampiran 3, Langkah-langkah analisis GAP sebagaimana lampiran 4, contoh GAP dan GBS sebagaimana lampiran 5, Program Kerja Pengawasan sebagaimana lampiran 6, Formulir Laporan Pelaksanaan GBS sebagaimana lampiran 7, contoh Laporan sebagaimana lampiran 8, serta daftar istilah sebagaimana lampiran 9.
- Keempat : Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender akan ditinjau, dikaji, diubah dan diperbaiki

disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan yang terjadi dengan perpedoman pada standar audit yang berlaku.

- Kelima : Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 21 Maret 2022

INSPEKTUR,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP 196306121985031001

**PEDOMAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Daerah.

2. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga nonKementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (good governance) dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Salah satu substansi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-SKPD.

Pemerintah menyepakati bahwa untuk percepatan pelaksanaan PUG telah ditetapkan Strategi Nasional (Stranas) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP- PA/11/2012. Dalam Stranas tersebut di atas, seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam Stranas.

Untuk menilai komitmen dan implementasi PUG khususnya pelaksanaan PPRG, diperlukan satu pedoman pengawasan atas pelaksanaan PPRG sebagai instrumen PPRG.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah untuk memberikan acuan bagi APIP untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan PPRG.

2. Tujuan

Menguatkan pelaksanaan PPRG melalui sistem pengawasan dengan tujuan:

- a. memastikan mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG;
- b. memastikan program/kegiatan telah responsif gender;
- c. memastikan ketersediaan instrumen PPRG; dan
- d. mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan PPRG.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini meliputi seluruh Kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan dan indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG. Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian keluaran (output) dari program/kegiatan yang telah memiliki lembar Gender Budget Statement (GBS).

D. MEKANISME PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan audit perencanaan dan penganggaran yang responsif gender meliputi proses penganggaran dan pelaksanaan:

1. Penganggaran

Dalam proses penganggaran, GBS disusun pada saat persiapan penyusunan RKA SKPD. GBS memuat komponen-komponen sebagai berikut:

a. Kebijakan/Program/Kegiatan

Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu gender, dimana rumusnya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA).

b. Analisis Situasi

Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari langkah GAP disusun dalam

bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentifikasi melalui aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

c. Rencana Aksi

Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.

d. Indikator Kinerja

Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.

e. Anggaran

Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

f. Tanda Tangan

Penandatanganan GBS adalah Kepala SKPD. Jika analisis gender menggunakan GAP, maka beberapa komponen GBS bisa diambilkan dari substansi analisis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam format GAP. Jika analisis tidak menggunakan GAP, maka isi komponen GBS dapat dijelaskan dengan format di bawah ini:

1) OPD

Diisi OPD yang diaudit.

2) Tahun Anggaran

Diisi tahun anggaran yang berkenaan.

3) Program

Nama Program

4) Kode Program

Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)

5) Analisis Situasi

Berisi informasi sebagai berikut:

a) Capaian dan gap antara target capaian dan kondisi saat ini

b) Kendala dan Hambatan dalam mencapai target

c) Identifikasi isu gender, dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut:

(i) Perbedaan pelayanan yang diterima antara laki-laki dan perempuan dan anak laki-laki dan anak perempuan;

(ii) Perbedaan akses antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan layanan tersebut;

(iii) Perbedaan manfaat atas layanan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki;

- (iv) Kebutuhan spesifik gender sudah terakomodasi atau belum.
- d) Identifikasi faktor-faktor penyebab atas terjadinya isu gender yang telah teridentifikasi baik internal maupun eksternal, terutama di tingkat penerima layanan (masyarakat).
- g. Capaian Program, terdiri:
 - Tolok Ukur
Tolok ukur kinerja yang ingin dicapai di tingkat outcome
 - Indikator dan Target Kinerja
Indikator hasil (outcome) yang sesuai dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1.
- h. Indikator Kinerja
Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.
- i. Jumlah Anggaran Program
Informasinya kemudian dituangkan dalam dalam form RKA SKPD 2.2.
- j. Rencana Aksi
Rencana aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan faktor penyebab yang telah teridentifikasi di analisis situasi. Perlu dipastikan:
 - Ada hubungan yang logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indicator kinerja;
 - Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan prioritas
- k. Tanda Tangan
Penandatanganan oleh Kepala SKPD.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan PPRG dilakukan dengan mengambil kegiatan yang anggarannya responsif gender (ARG) meliputi langkah-langkah:

- a. Dapatkan Gender Budget Statement (GBS);
- b. Dapatkan DPA-SKPD;
- c. Pilih anggaran yang responsif gender (ARG);
- d. Cermati kesesuaian kegiatan dengan Gender Budget Statement (GBS) yang meliputi Kebijakan/Program/Kegiatan, Analisis Situasi, Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Anggaran, Tanda Tangan.
- e. Tahapan pengawasan atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Pengawasan; yaitu langkah-langkah persiapan yang harus dilaksanakan, dimasukkan dalam PKPT, Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas, dan Survei Pendahuluan. Penentuan kriteria berdasarkan Juklak PPRG

untuk Pemerintah Daerah, mencakup pemenuhan atas ketersediaan, kualitas dan pelaksanaan GBS.

- 2) Mengukur Program/Kegiatan yang dilaksanakan; melalui revidu dokumen, wawancara atau diskusi dengan pelaksana kegiatan dan penerima manfaat, sehingga Pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait ketersediaan, kualitas dan pelaksanaan GBS.
- 3) Membandingkan realisasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan.
- 4) Saran rekomendasi perbaikan untuk perbaikan pelaksanaan PPRG ke depan, disesuaikan dengan kondisi yang sudah tercapai. Rekomendasi ditujukan pada pemangku kepentingan yaitu: Kepala Daerah, Pokja PUG, TAPD serta OPD itu sendiri.
- 5) Pemaparan hasil temuan dan rekomendasi;
- 6) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan tahun sebelumnya; dan
- 7) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pelaksanaan PPRG, Format Laporan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan disesuaikan dengan bentuk pengawasan (Pengawasan reguler atau Pengawasan untuk Tujuan Tertentu).

Penentuan Kriteria berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, mencakup:

- Pemenuhan atas ketersediaan GBS sesuai Regulasi, jumlah GBS yang disusun OPD sesuai kebijakan daerah tentang PPRG, misal 3 (tiga) program/kegiatan;
- Kualitas GBS; program/kegiatan terpilih merupakan program strategis dan prioritas, mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), penting untuk mengatasi isu gender, analisa situasi menyajikan data yang relevan, data terpilah atau data spesifik gender, isu gender jelas, ada keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerjanya SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebond), anggaran untuk menangani permasalahan/isu gender.
- Pelaksanaan GBS, Program/kegiatan pada Lembar GBS mengalami siklus APBD agar menjadi acuan dan indikator output dapat tercapai.

E. PENUTUP

Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender ini disusun guna memberikan panduan kepada tim dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan PPRG.


INSPEKTUR,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Susanto
SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP 196306121985031001

Format GBS dengan Analisis Menggunakan GAP

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: (Nama SKPD)	
TAHUN ANGGARAN	: (Tahun Anggaran)	
PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)	
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)	
ANALISIS SITUASI 1	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6) 2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)	
JUMLAH PROGRAM ANGGARAN	Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2	
RENCANA AKSI	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2.1	
	Keg.1	
	Masukan	Rp.
	Keluaran	
	Hasil	
	Keg.2	
	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2.1	
	Masukan	Rp.
Keluaran		
Hasil		

Kepala OPD

(.....)
 NIP

INSPEKTUR,
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 SUSANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP 196306121985031001



Format GBS dengan Analisis Menggunakan Instrumen Selain GAP

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)							
SKPD	: (Nama SKPD)						
TAHUN ANGGARAN	: (Tahun Anggaran)						
PROGRAM	Nama Program						
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)						
ANALISIS SITUASI 1	<p>Berisi informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian dan gap antara target capaian dan kondisi saat ini. 2. Kendala dan Hambatan dalam mencapai target. 3. Identifikasi isu gender, dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbedaan pelayanan yang diterima antara laki-laki dan perempuan dan anak laki-laki dan anak perempuan. ▪ Perbedaan akses antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan layanan tersebut. ▪ Perbedaan manfaat atas layanan yang diterima oleh perempuan & laki-laki. ▪ Kebutuhan spesifik gender sudah terakomodasi atau belum. 4. Identifikasi faktor-faktor penyebab atas terjadinya isu gender yang telah teridentifikasi baik internal maupun eksternal, terutama di tingkat penerima layanan (masyarakat). <p>Untuk memperkuat informasi, sertakan Data Statistik Gender yang relevan. Data statistik gender dapat berupa data terpilah dan data spesifik gender yang relevan.</p>						
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Tolok ukur kinerja yang ingin dicapai di tingkat outcome						
	2. Indikator dan Target Kinerja Indikator hasil (outcome) yang sesuai dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1.						
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya kemudian dituangkan dalam dalam form RKA SKPD 2.2						
RENCANA AKSI	<p>Rencana aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan faktor penyebab yang telah teridentifikasi di analisis situasi. Perlu dipastikan:</p> <p>Keg.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada hubungan yang logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indicator kinerja • Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan prioritas <p>Isi dari bagian ini kemudian dituangkan dlm Form RKA SKPD 2.2.1</p> <table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td></td> </tr> </table>	Masukan	Rp.	Keluaran		Hasil	
	Masukan	Rp.					
	Keluaran						
	Hasil						
	<p>Sama dengan penjelasan di kegiatan 1</p> <p>Keg.2</p> <table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td></td> </tr> </table>	Masukan	Rp.	Keluaran		Hasil	
	Masukan	Rp.					
	Keluaran						
	Hasil						

Kepala OPD

(
NIP

INSPEKTUR,
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 SUSANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP 19630612 198503 1 001

Langkah-Langkah Analisis GAP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
Berisi nama, tujuan dan sasaran dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang terpilih untuk dianalisis.	Berisi data pembuka wawasan, yang terpilih jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif, atau data terkait isu gender.	Berisi isu gender diproses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (hanya mencantumkan faktor kesenjangan yang relevan).	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Berisi reformulasi tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.	Berisi rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5. Mencakup juga rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.	Berisi base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Berisi indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5

Kepala OPD

(.....)
 NIP



INSPEKTUR,
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUSANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP 196306121985031001

GAP Bidang Kesehatan

Langkah 1	OPD	Dinas Kesehatan Provinsi xxxxxx
	Program Tujuan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan
Langkah 2	Data Pembuka Wawasan	<p>Capaian SPM Pelayanan bagi Ibu Hamil dan bayi baru lahir:</p> <p>a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 sebesar 75,59% dan target di tahun 2015 sebesar 95%.</p> <p>b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ditahun 2012 sebesar 58,84% dan target di tahun 2015 sebesar 80%.</p> <p>c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2012 sebesar 77,14% dan target di tahun 2015 sebesar 90%.</p> <p>d. Cakupan pelayanan nifas di tahun 2012sebesar 85,44% dan target di tahun 2015 sebesar 90%.</p> <p>Angka kematian Ibu di tahun 2012 : 9 kasus, terdiri dari 8 kasus ibu bersalin dan 1 kasus ibu nifas.</p>
Langkah 3	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat	<p>Faktor penyebab kematian ibu melahirkan terdiri dari 2, yaitu faktor klinis dan faktor non klinis</p> <p>Faktor Klinis: Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung yaitu pendarahan, infeksi, eklampsia (darah tinggi), persalinan lama dan abortus.</p> <p>Faktor non klinis:</p> <p>a. Ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang tersedia</p> <p>b. Ibu hamil terlambat mendapatkan pertolongan petugas medis</p>
Langkah 4	Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<p>a. Minimnya kapasitas petugas kesehatan diPuskesmas dalam menangani komplikaskebidanan</p> <p>b. Kemitraan bidan-dukun belum berjalan secara optimal padahal masih banyak ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh dukun karena alasan ketiadaan biaya maupun kultural.</p> <p>Sebaran bidan desa tidak merata yang mengakibatkan ibu hamil di daerah terpencil dan kepulauan sulit mengakses layanan kesehatan.</p>
Langkah 5	Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>a. Faktor ekonomi menyebabkan ibu hamil dari keluarga kurang mampu sangat bergantung pada layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau;</p> <p>b. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga ibu hamil kurang peduli untuk menjaga kesehatan selama kehamilan;</p> <p>c. Kedudukan dan peran perempuan di masyarakat mengakibatkan ibu hamil harus melaksanakan peran domestik mengurus rumah tangga. Bagi ibu hamil dengan resiko tinggi, tugas domestik rumah tangga semakin memperbesar resiko. Bagi ibu hamil yang memiliki anak</p> <p>d. kecil, alasan tidak/jarang memeriksakan, kehamilan karena tidak ada yang menjaga anaknya dirumah;</p> <p>e. kedudukan dan peran laki-laki/suami di masyarakat dalam mengambil keputusan mengakibatkan ibu hamil terlambat dibawa ke penyedia layanan kesehatan;</p> <p>f. minimnya transportasi untuk rujukan kasus, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga banyak kasus kematian ibu melahirkan disebabkan terlambat mendapatkan pertolongan medis karena jarak yang jauh.</p>
Langkah 6	Tujuan Responsif Gender	<p>Menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan melalui :</p> <p>a. Meningkatkan cakupan pelayanan kunjungan ibu hamil K4;</p> <p>b. Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;</p>

			c. Meningkatkan peran aktif suami dan masyarakat dalam mencegah kematian ibu melahirkan.
Langkah 7	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan /Indikator		<p>a. Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bagi petugas medis Puskesmas dengan memberikan kesempatan yang setara kepada petugas medis laki-laki dan perempuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Keluaran: jumlah petugas medis terlatih, baik petugas medis laki-laki maupun perempuan. o Hasil: Petugas medis di Puskesmas mampu menangani komplikasi kebidanan. <p>b. Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada pasangan suami-istri;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Keluaran: jumlah pasangan suami istri (kondisi istri hamil) yang mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. o Hasil: Meningkatnya peran suami dalam memberikan dukungan kepada istri selama hamil dan persalinan. <p>c. Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada tokoh masyarakat dan kepala desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Keluaran: jumlah tokoh masyarakat dan kepala desa yang mengikuti penyuluhan. o Hasil: Meningkatnya peran tokoh masyarakat dan kepala desa dalam mencegah kematian ibu melahirkan. <p>d. Pelayanan "mobile service" oleh Bidan Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Keluaran: jumlah ibu hamil yang dilayani oleh bidan desa dengan sistem "jemput bola". o Hasil: Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil. <p>e. Kemitraan Dukun-Bidan;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Keluaran: jumlah dukun yang menjalin kemitraan dengan bidan dalam proses menolong persalinan. o Hasil: meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan.
Langkah 8		Baseline	<p>Data capaian tahun 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 sebesar 75,59% • Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2012 sebesar 58,84% • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2012 sebesar 77,14% • Cakupan pelayanan nifas di tahun 2012 sebesar 85,44%.
Langkah 9	Pengukuran Hasil	Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2013 sebesar 82,06%; tahun 2014 sebesar 88,53% dan tahun 2015 sebesar 95% • Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2013 sebesar 65,89%; tahun 2014 sebesar 72,94% dan tahun 2015 sebesar 80% • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2013 sebesar 81,42%; tahun 2014 sebesar 85,7% dan tahun 2015 sebesar 90% • Cakupan pelayanan nifas di tahun 2013 sebesar 86,96%, tahun 2014 sebesar 88,48% dan tahun 2015 sebesar 90%

Kepala OPD

(.....)
NIP

INSPEKTUR,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP 196306121985031001

Contoh GBS Bidang Kesehatan

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SKPD : DINAS KESEHATAN DIY TAHUN ANGGARAN :	
Program	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kode Program	1.02.xx.32
Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pembuka Wawasan Capaian SPM Pelayanan bagi Ibu Hamil: <ol style="list-style-type: none"> a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 sebesar 75,59% dan target di tahun 2015 sebesar 95%; b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ditahun 2012 sebesar 58,84% dan target di tahun 2015 sebesar 80%; c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ditahun 2012 sebesar 77,14% dan target di tahun 2015 sebesar 90%; d. Cakupan pelayanan nifas d itahun 2012 sebesar 85,44% dan target di tahun 2015 sebesar 90%; e. Angka kematian Ibu di tahun 2012: 9 kasus, terdiri dari 8 kasus ibu bersalin dan 1 kasus ibu nifas. 2. Faktor Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Faktor penyebab kematian ibu melahirkan terdiri dari 2, yaitu faktor klinis dan faktor non klinis Faktor Klinis: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung yaitu pendarahan, infeksi, eklampsia (darah tinggi), persalinan lama dan abortus. Faktor non klinis: <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang tersedia; b. Ibu hamil terlambat mendapatkan pertolongan petugas medis. 3. Kendala dalam Upaya Mengatasi Kematian Ibu Melahirkan <ol style="list-style-type: none"> a. Minimnya kapasitas petugas kesehatan di Puskesmas dalam menangani komplikasi kebidanan. b. Kemitraan bidan-dukun belum berjalan secara optimal padahal masih banyak ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh dukun karena alasan ketiadaan biaya maupun kultural. Sebaran bidan desa tidak merata yang mengakibatkan ibu hamil di daerah terpencil dan kepulauan sulit mengakses layanan kesehatan 4. Isu Gender <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor ekonomi menyebabkan ibu hamil dari keluarga kurang mampu sangat bergantung pada layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau. b. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga ibu hamil kurang peduli untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. c. Kedudukan dan peran perempuan dimasyarakat mengakibatkan ibu hamil harus melaksanakan peran domestik mengurus rumah tangga. Bagi ibu hamil dengan resiko tinggi, tugas domestik rumah tangga semakin memperbesar resiko. Bagi ibu hamil yang memiliki anak kecil, alasan tidak/jarang memeriksakan kehamilan karen tidak ada yang menjaga anaknya di rumah. d. Kedudukan dan peran laki-laki/suami di masyarakat dalam mengambil keputusan mengakibatkan ibu hamil terlambat dibawa ke penyedia

		layanan kesehatan. Minimnya transportasi untuk rujukan kasus, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga banyak kasus kematian ibu melahirkan disebabkan terlambat mendapatkan pertolongan medis karena jarak yg jauh.
Capaian Program		<p>1. Tolok Ukur Turunnya kasus kematian ibu melahirkan</p> <p>2. Indikator Kinerja dan Target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2013 sebesar 82,06%; tahun 2014 sebesar 88,53% dan tahun 2015 sebesar 95%. • Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangan iditahun 2013 sebesar 65,89%; tahun 2014 sebesar 72,94% dan tahun 2015 sebesar 80%. • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2013 sebesar 81,42%; tahun 2014 sebesar 85,7% dan tahun 2015 sebesar 90%. • Cakupan pelayanan nifas ditahun 2013 sebesar 86,96%, tahun 2014 sebesar 88,48% dan tahun 2015 sebesar 90%.
Jumlah Program	Anggaran	Rp 2.115.000.000
Rencana Aksi	Kegiatan 1	Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bagi petugas medis Puskesmas dengan memberikan kesempatan yang setara kepada petugas medis laki-laki dan perempuan
		Masukan : Rp. 225.000.000,-
		Keluaran : 45 petugas medis terlatih, baik petugas medis laki-laki maupun perempuan
		Hasil : Petugas medis di Puskesmas mampu menangani komplikasi kebidanan
	Kegiatan 2	Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada pasangan suami istri
		Masukan : Rp 160.000.000
		Keluaran : 400 jumlah pasangan suami istri (kondisi istri hamil) yang mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi.
		Hasil I: Meningkatnya peran suami dalam memberikan dukungan kepada istri selama hamil dan persalinan
	Kegiatan 3	Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada tokoh masyarakat dan kepala desa
		Masukan : Rp 180.000.000
		Keluaran : 500 tokoh masyarakat dan kepala desa yang mengikuti penyuluhan
		Hasil : Meningkatnya peran tokoh masyarakat dan kepala desa dalam mencegah kematian ibu melahirkan

	Kegiatan 4	Masukan : Rp 1.000.000.000
		Keluaran : 2000 ibu hamil di desa terpencil yang dilayani oleh bidan desa dengan sistem "jemput bola".
		Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil.
	Kegiatan 4	Kemitraan Dukun-Bidan.
		Masukan : Rp 550.000.000,00.
		Keluaran : 200 dukun yang menjalin kemitraan dengan bidan dalam proses menolong persalinan.
		Hasil : meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan

Kepala OPD

(.....)
NIP

INSPEKTUR,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP 19630612 198503 1 001

FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN GBS

Format Laporan Pelaksanaan GBS

SKPD :
 TA :

No	Program/Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	KEUANGAN			KINERJA		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(4)/(3)] x 100%	(6)	(7)	(8) = [(7)/(6)] x 100%
1							
2							
	dan seterusnya						

Kepala OPD

(.....)
 NIP

Keterangan isi dari masing-masing kolom :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Berisi program/kegiatan yang program/kegiatan atau lebih. telah dilengkapi dengan lembar GBS, bisa satu
- Kolom 3 : Berisi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai outcome/output pada prog/keg pada kolom 1.
- Kolom 4 : Berisi realisasi anggaran program/kegiatan
- Kolom 5 : Berisi persentase realisasi dari alokasi anggaran program/kegiatan pada kolom 1.
- Kolom 6 : Berisi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam GBS dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA2.2.1
- Kolom 7 : Berisi realisasi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dilaporkan dalam LAKIP.
- Kolom 8 : Persentase realisasi dari target kinerja program/kegiatan pada kolom 1.

INSPEKTUR,
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 SUSANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP 196306121985031001



LAMPIRAN 6 : Program Kerja Pengawasan
 KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 188.4/ /KEP/INPTD/2022

Program Kerja Pengawasan

NO	ASPEK	LANGKAH KERJA		NAMA PELAKSANA	WAKTU	NO KKP
A	Ketersediaan GBS	I	Dapatkan Dokumen Perencanaan meliputi :			
		1	Dok RPJPD			
		2	Dok RPJPD			
		3	Dok RPJPD			
		4	Dok RENSTRA SKPD			
		5	Dok RENJA SKPD			
		6	ARG dalam RKA-SKPD			
		7	Dapatkan GBS			
		8	Dapatkan GAP			
		II	Dapatkan peraturan terkait dengan ARG			
		1	Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait			
		2	Pedoman penyusunan RKPD			
		3	Pedoman penyusunan APBD			
		4	Peraturan Daerah terkait			
		III	Bandingkan kesesuaian			
		1	Format GBS dengan pedomannya			
		2	GBS dengan RKA			
		3	GBS dengan dokumen perencanaan lainnya			
		4	Buat simpulan hasil pengawasan ketersediaan Gender Budget Statement			
B	Kualitas GBS	1	Pastikan program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBSnya merupakan program strategis dan prioritas			
		2	Pastikan analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilih atau data spesifik gender			
		3	Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas			
		4	Pastikan ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja			
		5	Pastikan indikator kinerja SMART meliputi: 1. Target Realistis 2. Strategi Pencapaian mengacu pada target 3. Tepat sasaran 4. GBS dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan 5. Buat simpulan hasil pelaksanaan GBS			

INSPEKTUR
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ketua Tim

SUSANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP 19630612198503100

(.....)
 NIP.....

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PELAKSANAAN PPRG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN**

Bab I. Pendahuluan

1. Simpulan
berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Provinsi/Kab/Kota tahun anggaran x
2. Saran
berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang. Baik yang perlu dilakukan oleh SKPD bersangkutan maupun oleh SKPD Penggerak PPRG (Bappeda, DPPKA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat).

Bab II. Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum
 - a. Dasar
Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA ... yang terdiri dari:
 - (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
 - (ii) peraturan terkait PPRG.
 - b. Tujuan
Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.
 - c. Ruang Lingkup
Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari :
 - (i) satu program tertentu;
 - (ii) banyak program.
 - d. Batasan
Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.
2. Hasil Pengawasan
Berisi penjelasan mengenai:
 - a. Tahapan dalam melakukan pengawasan;
 - b. Sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;
 - c. Temuan pengawasan; berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS disusun dan dilaksanakan.
3. Kalimat Penutup


INSPEKTUR,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Susanto
SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001